

E-ISSN: 2656-7814 DOI: 10.33654/pgsd	ELEMENTA: JURNAL PGSD STKIP PGRI BANJARMASIN Website jurnal: http://jurnal.stkipbjm.ac.id/index.php/pgsd	Vol. 4, No. 1, Maret 2022 Halaman: 46- 56
---	--	--

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA SDN 05 CAKRANEGARA
PELAJARAN 2021/2022**

Rizca Ayu Widyasari
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Mataram
rizca.ayuwidyasari@gmail.com

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SDN 05 Cakranegara. Metode yang digunakan dalam melakukan analisis penelitian ini adalah analisis kualitatif, analisis kuantitatif dan analisis distribusi frekuensi. Analisis kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi program-program yang telah dilaksanakan di SDN 05 Cakranegara, mengidentifikasi sarana prasarana pendidikan di SDN 05 Cakranegara, mengidentifikasi partisipasi masyarakat di SDN 05 Cakranegara. Dari hasil analisis diketahui bahwa bentuk partisipasi masyarakat yang menonjol adalah dengan menyampaikan usulan dan gagasan. Adapun tingkat partisipasi yang mengacu pada tipologi Arnstein termasuk dalam kategori *placation*. Dalam tangga kelima ini, masyarakat telah memiliki beberapa pengaruh meskipun dalam beberapa hal masih ditentukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Adapun data responden adalah sebagian besar berjenis kelamin laki-laki, berusia antara 40-50 tahun, berpendidikan sarjana strata 2, memiliki pekerjaan sebagai guru/dosen dan wiraswasta serta berpenghasilan cukup tinggi.

Kata Kunci: *Partisipasi Masyarakat, Sarana Prasarana Pendidikan*

**COMMUNITY PARTICIPATION IN FACILITIES AND INFRASTRUCTURE
MANAGEMENT SDN 05 CAKRANEGARA ACADEMIC YEAR 2021/2022**

Abstract: *The aim of the research is to evaluate citizen participation in performing educational infrastructure quality improvement program in SDN 05 Cakranegara. The methods used in analyzing the research are qualitative analysis, quantitative analysis and frequency distribution analysis. Qualitative analysis is used to identify the programs performed in SDN 05 Cakranegara, identify the educational infrastructures in SDN 05 Cakranegara, and identify the citizen participation in SDN 05 Cakranegara. The results of the analysis is the outstanding form of citizen participation is expressing advice and suggestion. And the rung of participation referring to Arnstein typology is in placation category. In this fifth ladder, placation means that the society already has the influence although in some ways are still made by powerholders to judge the legitimacy of the advice. The data of the respondents are mostly male, 40-50 years old, postgraduates, teacher/lecture as well as enteprenuer and well-earned.*

Keywords: Citizen Participation, Educational Infrastructure

PENDAHULUAN

Sarana dan prasarana sekolah dalam UU No. 20 tahun 2003 Pasal 45 dikatakan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keutuhan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial emosional dan kejiwaan peserta didik. Sarana dan prasarana merupakan suatu kondisi yang dipersyaratkan untuk berlangsungnya kegiatan belajar mengajar pada setiap satuan pendidikan. Didalam penerapannya sarana dan prasarana biasa disebut dengan bidang pelayanan umum yang bersifat *kondisiosikuno*. Sarana dan prasarana pendidikan dalam istilah asing dikenal sebagai *School Plant Administration* dimana mencakup lahan, bangunan, perabot dan perlengkapan pendidikan di sekolah maupun madrasah.

Setiap sekolah pasti memiliki cara pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yang berbeda-beda mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penghapusan. Begitu pula dengan penataan lahan, bangunan, perlengkapan dan perabotan sekolah secara tepat guna dan tepat sasaran. Pada prinsipnya sarana dan prasarana harus menggambarkan cita dan citra masyarakat seperti halnya yang dinyatakan dalam filsafat dan tujuan pendidikan. Sarana dan prasarana hendaknya merupakan pancaran keinginan bersama dan dengan pertimbangan suatu tim ahli yang cukup cakap dalam merencanakan di sekolah.

Sarana dan prasarana juga hendaknya memadai bagi kepentingan peserta didik demi terbentuknya karakter mereka dan dapat melayani serta menjamin mereka diwaktu belajar, bekerja dan bermain sesuai dengan bakatnya masing-masing. Selain itu sarana dan prasarana harus disesuaikan kepentingan pendidikan yang bersumber dari kepentingan, kegunaan, serta manfaat bagi anak didik dan guru di sekolah. Sebagai penanggung jawab secara efektif, melatih para petugas serta memilih alat dan cara menggunakan agar dapat menyesuaikan diri serta melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya dan profesinya. SD Negeri 05 Cakranegara merupakan salah satu SD yang telah berakreditasi A yang ada di Cakranegara. Konsekuensi dari pengakuan ini adalah diperlukannya program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan yang sesuai dengan penataan lahan, bangunan, perlengkapan dan perabotan sekolah secara tepat guna dan tepat sasaran.

Pada prinsipnya sarana dan prasarana harus menggambarkan cita dan citra masyarakat seperti halnya yang dinyatakan dalam filsafat dan tujuan pendidikan. Sarana dan prasarana hendaknya merupakan pancaran keinginan bersama dan dengan pertimbangan suatu tim ahli yang cukup cakap dalam merencanakan di sekolah. Sarana dan prasarana juga hendaknya memadai bagi kepentingan peserta didik demi terbentuknya karakter mereka dan dapat melayani serta menjamin mereka diwaktu belajar, bekerja dan bermain sesuai dengan bakatnya masing-masing. Selain itu sarana dan prasarana harus disesuaikan kepentingan pendidikan yang bersumber dari kepentingan, kegunaan, serta manfaat bagi anak didik dan guru di sekolah. Sebagai

penanggung jawab secara efektif, melatih para petugas serta memilih alat dan cara menggunakan agar dapat menyesuaikan diri serta melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya dan profesinya.

SD Negeri 05 Cakranegara merupakan salah satu SD yang telah berakreditasi A yang ada di Cakranegara. Konsekuensi dari pengakuan ini adalah diperlukannya program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar internasional. Hal ini tentu saja menuntut adanya partisipasi masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan Pendekatan penelitian ini menggunakan studi kasus. Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi berperan serta (*participan observastion*), wawancara mendalam (*in deoth inteview*) dan dokumentasi. Analisis data model Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2013:337). Aktivitas dalam analisis data yaitu, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Untuk menentukan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Menurut Sugiyono (2013:365), temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antar yang dilaporkan peneliti dengan yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam uji keabsahan data terbagi menjadi empat uji yakni: uji kredibilitas data, uji validitas eksternal(*transferability*), uji reabilitas (*dependability*), uji obyektivitas (*confirmability*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan

A. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan data Pada tahapan awal kegiatan partisipasi masyarakat sebagian besar responden, yaitu sejumlah 52 % nya memilih untuk menyumbang usulan/gagasan dalam berpartisipasi. Hal ini berarti mempertegas uraian di awal, bahwa bentuk partisipasi tidak lagi diartikan sempit (tidak hanya terbatas pada pembiayaan, pendanaan maupun material). Karena tidak lebih dari jumlah tersebut, yaitu sebanyak 29 % ikut berpartisipasi dengan cara menyumbang uang. Selanjutnya urutan ketiga, yaitu sejumlah 19 % sisanya melakukan partisipasi dengan cara bentuk lain,

Table 1. Bentuk Partisipasi Masyarakat

No.	Bentuk Partisipasi	Frekuensi	Persentase
1.	Menyumbang Uang	6	29
2.	Menyumbang Barang	-	-
3.	Menyumbang Tenaga	-	-
4.	Menyumbang Usulan/Gagasan	11	52
5.	Bentuk Lain	4	19
Jumlah		21	100

Sedangkan pada tahapan pelaksanaan kegiatan gabungan antara menyumbang usulan/gagasan dengan tenaga dan antara menyumbang uang dengan menyumbang usulan/gagasan. sebagian besar responden, yaitu sejumlah 47 %nya memilih untuk dikerjakan bersama antara sekolah dengan Komite Sekolah. Hal ini berarti bahwa Komite Sekolah bukanlah sebagai pelengkap saja dalam sebuah sekolah namun telah menjadi partner dalam melaksanakan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan. Pilihan kedua yaitu diserahkan sekolah dengan dana dari orang tua siswa dan Komite Sekolah merupakan bentuk partisipasi dari sejumlah 24 % responden.

Table 2. Hasil penelitian Bentuk Partisipasi Masyarakat

No.	BENTUK PARTISIPASI	FREKUENSI	PERSENTASE
1.	Dikerjakan Bersama Antara Sekolah Dan Komite	11	47
2.	Membuat Kesepakatan Atau Aturan Tertentu Dalam Melaksanakan Program Tersebut	1	5
3.	Diserahkan Kepada Sekolah Dengan Dana Pemerintah	1	5
4.	Diserahkan Kepada Sekolah Dengan Dana Orang Tua	3	14
5.	Diserahkan Kepada Sekolah Dengan Dana Orang Tua Dan Komite Sekolah	5	24
6.	Bentuk Lain	1	5
Jumlah		21	100

a. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan tingkat kehadiran dalam rapat pertemuan, sebagian besar responden hadir dalam pertemuan untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat namun pendapatnya tidak diperhitungkan, yaitu sebanyak 10 responden atau sekitar 48 %. Hal ini menandakan adanya pesimisme dari beberapa responden. Kemudian disusul dengan hadir dan mendapat pembagian tanggung jawab yang sama sejumlah 19 % atau 4 orang

responden. Sebanyak masing-masing dua orang atau 9,3 % memberikan pilihan untuk hadir dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dan hadir dan mampu untuk membuat keputusan dalam berpartisipasi. Selanjutnya pilihan hadir sekedar memenuhi undangan, hadir untuk memperoleh informasi tanpa menyampaikan pendapat dan hadir untuk menyampaikan pendapat namun hanya sedikit pendapat yang diperhatikan dipilih oleh masing-masing satu orang responden. Tidak ada responden yang memilih hadir karena dipaksa. maka dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam tingkat keaktifan hadir pada pertemuan adalah 104.

Table 3. Tingkat Kehadiran Dalam Pertemuan

No.	Variabel	Skala Penilaian	N	Presentase (%)	Bobot	N x Bobot
1.	Tingkat kehadiran dalam pertemuan	Hadir Karena dipaksa	-	-	1	-
		Hadir sekedar memenuhi undangan	1	4,8	2	2
		Hadir untuk memperoleh informasi tanpa menyampaikan pendapat	1	4,8	3	3
		Hadir untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat tapi pendapatnya tidak diperhitungkan	10	48	4	40
		Hadir untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat dan pendapatnya diperhitungkan	1	4,8	5	5
		Hadir dan mendapat tanggung jawab yang sama	4	19	6	24
		Hadir dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan	2	9,3	7	14
		Hadir dan mampu membuat keputusan	2	9,3	8	16
JUMLAH			21	100		104

Jumlah skor tersebut bila termasuk dalam tingkat *placation* (tangga kelima dari delapan tangga Arsntein). Diketahui bahwa sebagian besar responden ternyata aktif dalam berdiskusi dan mendapat pembagian tanggung jawab yang setara. Jumlah tersebut mencapai 43,5 % dari total jumlah responden. Angka tersebut setara dengan 9 orang responden. Jawaban terbanyak kedua adalah mendapat informasi dan boleh berdiskusi tetapi hasil diskusi tidak diperhitungkan. Jumlah responden yang memilih jawaban tersebut adalah 3 orang atau setara dengan 14 %. Hal ini sama jumlahnya dengan pilihan mendapat informasi dan boleh berdiskui tetapi hasil diskusi hanya sedikit yang diperhitungkan, yaitu sebanyak 3 orang (14%). Urutan ketiga yaitu mendapat informasi dan berdiskusi sekedamya, aktif berdiskusi dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan serta aktif berdiskusi dan mampu untuk membuat keputusan. Ketiga pilihan jawaban tersebut memiliki nilai yang sama, yaitu masing-masing 2 orang

responden. Sedangkan pilihan jawaban berdiskusi karena dipaksa dan mendapat informasi namun tidak diberi kesempatan berdiskusi tidak ada yang memilihnya. Tingkat partisipasi masyarakat dalam keaktifan berdiskusi dan mengemukakan pendapat memiliki skor 115.

Table 4. Tingkat Keaktifan dalam Berdiskusi

No.	Variabel	Skala Penilaian	N	Presentase (%)	Bobot	N x Bobot
1.	Tingkat keaktifan dalam berdiskusi dan mengemukakan pendapat	Berdiskusi Karena dipaksa	-	-	1	-
		Mendapat informasi dan berdiskusi sekadarnya	2	9,5	2	4
		Mendapatkan informasi dan tidak diberi kesempatan berdiskusi	-	-	3	-
		Mendapatkan informasi dan diberi kesempatan berdiskusi tetapi hasil diskusi tidak diperhitungkan	3	14	4	12
		Aktif berdiskusi tetapi hasil diskusi hanya sedikit yang diperhitungkan	3	14	5	15
		Aktif berdiskusi dan mendapat tanggung jawab yang setara	9	43,5	6	54
		Aktif berdiskusi dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan	2	9,5	7	14
		Aktif berdiskusi dan mampu membuat keputusan	2	9,5	8	16
JUMLAH			21	100		115

Mengacu pada tabel 4, maka jumlah skor tersebut masuk dalam kategori *partnership*, yaitu tangga keenam dari delapan tangga tingkat partisipasi yang dikemukakan oleh Sherry Amstein. dapat disimpulkan bahwa tingkat keaktifan dalam kegiatan fisik memiliki skor 108. Jumlah skor tersebut termasuk dalam tingkat *placation* (tangga kelima dari delapan tangga Amstein). Pada tingkat *placation* dapat diartikan bahwa masyarakat terlibat dalam kegiatan fisik. Selain itu masyarakat juga memiliki beberapa pengaruh. Namun demikian, ada beberapa hal yang masih ditentukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Tingkat *placation* ini termasuk dalam derajat penghargaan atau *degree of tokenisme*, yaitu suatu tingkat partisipasi di mana masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan fisik, namun mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan

jaminan bahwa ide-ide mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan.

Table 5. Tingkat Keaktifan dalam Kegiatan Fisik

No.	Variabel	Skala Penilaian	N	Presentase (%)	Bobot	N x Bobot
1.	Tingkat keaktifan dalam kegiatan fisik	Terlibat Karena dipaksa	-	-	1	-
		Terlibat sekadarnya saja	4	19	2	8
		Terlibat tanpa mendapat kesempatan berpendapat	-	-	3	-
		Terlibat dan berkesempatan menyampaikan ide tapi tidak diperhitungkan	2	9,5	4	8
		Terlibat tapi sedikit idenya yang diperhitungkan	5	24	5	25
		Terlibat dan mendapat tanggung jawab yang setara	5	24	6	30
		Terlibat dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan	3	14	7	21
		Terlibat dan mampu membuat keputusan	2	9,5	8	16
JUMLAH			21	100		108

Dari tabel 5 di atas, diketahui bahwa sebagian besar responden ternyata berpartisipasi dengan membayar dan mendapat pembagian tanggung jawab yang setara dalam pemanfaatan dana. Jumlah tersebut mencapai 24 % dari total jumlah responden, atau setara dengan 5 orang responden. Jawaban terbanyak kedua adalah membayar dan tidak berkesempatan menyampaikan ide pemanfaatannya. Jumlah responden yang memilih jawaban tersebut adalah 4 orang atau setara dengan 19,1 %. Sedangkan pilihan terbanyak ketiga adalah membayar dan berkesempatan menyampaikan ide tetapi ide pemanfaatan dana tidak diperhitungkan, membayar tetapi hanya sedikit ide pemanfaatan dana yang dilaksanakan di lapangan, serta membayar dan memiliki kewenangan melaksanakan ide pemanfaatannya. Masing-masing jawaban tersebut dipilih oleh 3 orang responden. Jumlah tersebut sama dengan 14,2 %. Urutan selanjutnya adalah membayar dan mampu membuat

keputusan serta mampu mengakses dana dari luar dipilih oleh 2 orang responden atau 9,5 %. Sedangkan 1 (4,8%) orang memilih membayar ala kadarnya dan tidak memperhatikan pemanfaatannya. Tidak ada responden yang memilih membayar karena dipaksa dan tidak memperhatikan pemanfaatannya. Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kesediaan untuk membayar memiliki skor 108.

Table 6. Tingkat Kesediaan untuk Membayar

No.	Variabel	Skala Penilaian	N	Presentase (%)	Bobot	N x Bobot
1.	Tingkat kesediaan untuk membayar	Membayar Karena dipaksa dan tidak memperhatikan manfaatnya	-	-	1	-
		membayar sekadarnya dan tidak memperhatikan pemanfaatannya	1	4,8	2	2
		membayar dan tidak menyampaikan ide pemanfaatannya	4	19,1	3	12
		membayar dan tidak menyampaikan ide pemanfaatannya tapi tidak di perhitungkan	3	14,2	4	12
		Membayar tapi sedikit idenya yang diperhitungkan	3	14,2	5	15
		membayar dan mendapat tanggung jawab yang setara	5	24	6	30
		membayar dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan	3	14,2	7	21
		Membayar dan mampu membuat keputusan	2	9,5	8	16
		JUMLAH	21	100	108	

Mengacu pada tabel 6, maka jumlah skor tersebut masuk dalam kategori *placation*, yaitu tangga kelima dari delapan tangga tingkat partisipasi yang dikemukakan oleh Sherry Arnstein.

Table 6. Tingkat Partisipasi Masyarakat

No. TANGGA	TINGKAT PARTISIPASI	JUMLAH SKOR
8	<i>Citizen Control</i>	149,625 - 168
7	<i>Delegated Power</i>	131,26 - 149,624
6	<i>Partnership</i>	112,876 - 131,25
5	<i>Placation</i>	94,6 - 112,875
4	<i>Consultation</i>	76,126 - 94,5
3	<i>Informing</i>	57,76 - 76,125
2	<i>Therapy</i>	39,376 - 57,75
1	<i>Manipulation</i>	21 - 39,375

(Sumber: “A Ladder of Citizen Participation” dalam *Journal of the American Planning Association* (1969), Sherry Arstein)

B. Faktor-faktor mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap sesuatu hal berhubungan dengan faktor internal dan eksternal yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari individu responden itu sendiri. Faktor-faktor tersebut meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.

Berdasarkan hasil perhitungan distribusi frekuensi sebagaimana ditampilkan pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ternyata faktor jenis kelamin responden yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SDN 05 Cakranegara didominasi kaum pria, yaitu sebanyak 19 orang. Dengan kata lain 90,5 % dari seluruh responden adalah pria. Hal ini mempertegas pendapat Soekanto (1982) bahwa partisipasi dari kaum laki-laki dan perempuan terhadap sesuatu hak akan berbeda. Ini terjadi karena adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat yang membedakan

Kedudukan laki-laki dan perempuan pada derajat yang berbeda. Perbedaan ini pada akhirnya akan melahirkan kedudukan dan peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu hal ini juga akan membedakan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

Selanjutnya berkaitan dengan faktor usia, dari hasil perhitungan distribusi frekuensi usia responden diketahui bahwa 48 % dari jumlah responden berumur antara 31 – 40 tahun. Dengan kata lain, jumlah responden yang berusia 31 – 40 tahun adalah 10 orang. Kisaran pada usia tersebut merupakan usia matang. Dengan demikian hal ini menandakan bahwa ternyata senioritas memiliki pengaruh dalam hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan.

Karena golongan usia tersebut dianggap lebih berpengalaman sehingga akan lebih banyak memberikan pendapat dan juga menetapkan keputusan.

Faktor pendidikan dianggap berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Karena dengan pendidikan yang diperoleh, seseorang akan lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar serta cepat tanggap terhadap inovasi dan perubahan. Dari hasil perhitungan distribusi frekuensi pada tingkat pendidikan responden diketahui bahwa sebagian besar responden berpendidikan sarjana strata 1. Jumlah tersebut mencapai 43 % dari jumlah total responden. Hal ini berarti terdapat 9 orang yang berpendidikan sarjana strata 1.

Secara akumulatif, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SDN 05 Cakranegara sebagian besar memiliki tingkat pendidikan sarjana, yaitu 95 % atau sejumlah 20 orang dari 21 responden. Hanya satu orang responden saja atau 5 % yang berpendidikan SMP. Dari hasil perhitungan frekuensi faktor pekerjaan seperti pada tabel IV.9 di atas, diketahui bahwa ada keseimbangan antara profesi guru/dosen dengan wiraswasta. Kedua profesi tersebut mendominasi para responden, yaitu masing-masing 28,5 %. Jumlah tersebut berarti mencapai 6 orang dari total 21 responden.

Faktor jenis pekerjaan mampu mempengaruhi partisipasi pada hal-hal tertentu, karena berkaitan dengan derajat aktivitas dalam kelompok dan mobilitas individu. Jenis pekerjaan seseorang akan mempengaruhi waktu luang seseorang yang dapat digunakan dalam berpartisipasi misalnya menghadiri pertemuan-pertemuan.

Faktor terakhir, yaitu faktor penghasilan, dari perhitungan distribusi frekuensinya, terlihat bahwa sebagian besar responden berpenghasilan lebih dari 5 juta, yaitu sejumlah 62 % atau 13 responden. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden berpenghasilan menengah ke atas.

Besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berperan serta. Tingkat pendapatan ini mempengaruhi kemampuan finansial masyarakat untuk berinvestasi.

PENUTUP

1. Pada dasarnya bentuk partisipasi masyarakat di SDN 05 Cakranegara dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan sudah dapat dikatakan cukup baik. Namun kiranya perlu dipertegas lagi bahwasanya tanggung jawab program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan juga ada pada masyarakat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan ke dalam berbagai

bentuk. Dengan memberikan sosialisasi aktif tentang program-program sekolah maka diharapkan Komite Sekolah tidak akan merasa ditinggalkan.

2. Partispasi masyarakat di SDN 05 Cakranegara sudah dapat dikatakan cukup baik. Karena terlihat adanya partisipasi aktif dari Komite Sekolah. Namun ternyata masih ada dominasi pemegang kekuasaan. Dengan kondisi demikian, dikhawatirkan Komite Sekolah akan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu, Kepala Sekolah harus mampu mewedahi aspirasi masyarakat tersebut dengan cara melibatkan mereka secara penuh pada kegiatan-kegiatan yang bukan merupakan program dari pemerintah. Dengan demikian, Komite Sekolah akan merasa bahwa mereka benar-benar dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di sekolah tersebut, karena mereka dilibatkan dari awal pengidentifikasian masalah, pembuatan program kerja hingga pelaksanaannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada dewan redaksi *Elementa: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* yang telah mewedahi penulis untuk menulis karya ilmiah. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dermawan, Oki. 2020. *Manajemen Fasilitas Pendidikan*. Jakarta Timur: Edu Pustaka
- Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan. 2019. *Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah (MPPKS – SAR)*. Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan
- Handayani, Hikmatul, Nur. dan Andriani, Helmina. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta
- Manu, Lukas, dan Blegur, Jusuf. 2017. *Manajemen Berbasis Sekolah*, Kupang: Jusuf Aryani Learning
- Nasrudin, N. dan Maryadi, M, 2019. Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Pembelajaran SD. *Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Proses Pembelajaran 17-19*
- Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Tsanawiah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)*. 2007. Jakarta: Edu Pustaka
- Pratiwi, I. ZM, Hamidsyukrie. Dan Muntari. 2016. *Jurnal Ilmiah Profesi pendidikan. Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri Se-Kecamatan Cakranegara 94-97*
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta